

**PRAKTEK BAGI HASIL KARET DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA KOTO SIMANDOLAK KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)



DISUSUN OLEH :

ANDRISAL
NIM : 10325022530

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **"PRAKTEK BAGI HASIL KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**, (Studi Kasus di desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak, untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak menguntungkan kedua belah pihak dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial mereka serta untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak sudah relevan dengan perspektif ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Terdapat lima macam sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak yaitu; Pertama, sistem sewa yang mana petani penggarap menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik lahan, sebagai ganti dari hasil lahannya. Kedua, Sistem bagi duo dimana yang pemilik lahan dan petani penggarap berbagi hasil dari hasil lahan sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Ketiga, sistem bagian batang yang mana adanya bagian tertentu yang di dapat oleh pemilik kebun sebelum pembagian di lakukan. Keempat, adalah sistem talobiah takurang yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk di sadap dengan tujuan utamanya membantu perekonomian petani tersebut. Kelima, adalah sistem bagi tiga, yang mana sepertiganya untuk pemilik kebun dan selebihnya untuk petani penyadap.
2. Sistem bagi hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat Koto Simandolak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian mereka, baik kepada pemilik kebun begitu juga kepada petani penggarap. Adapun bagi pemilik kebun manfaatnya adalah kebun mereka miliki tidak terlantar begitu saja sehingga tetap menghasilkan, sedangkan bagi petani penggarap selain mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka terkadangpun mereka bisa membeli alat-alat elektronik dan bahkan mereka pun bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang perguruan tinggi.
3. Sistem bagi hasil karet yang di lakukan oleh masyarakat Koto Simandolak juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial mereka, yang mana dengan adanya kerja sama antara mereka, terjalin hubungan yang sangat harmonis.
4. Secara garis besar praktek bagi hasil karet yang di lakukan oleh masyarakat desa Koto Simandolak sudah sesuai dengan sistem bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam. hanya saja di sistem bagian batang, dilihat terlebih dahulu sebab pemotongan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA KOTO SIMANDOLAK	
A. Keadaan Geografis.....	10
B. Keadaan Demografis	11
C. Keadaan Sosial Budaya	13
BAB III : TINJAUAN UMUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM EKONOMI ISLAM	
A. Pengertian Ekonomi Islam.....	22
B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam	26

C. Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam.....	35
D. Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam	39
BAB IV :ANALISA SISTEM BAGI HASIL KARET DI DESA KOTO SIMANDOLAK	
A. Sistem Bagi Hasil Karet di Desa Koto Simandolak.....	44
B. Pengaruh Sitem Bagi Hasil Karet Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial Masyarakat Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	50
C. Sistem Bagi Hasil Karet di Desa Koto Simandolak Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam.....	53
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa dan hal lainnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta terjalinnya pertalian antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi sifat tamak dan rakusnya manusia serta mementingkan diri sendiri terkadang masih melekat pada manusia itu sendiri, supaya hak masing-masing jangan di sia-siakan dan demi kemaslahatan, maka agama memberikan aturan yang sebaik-baiknya sebagai mana yang telah di atur dalam Al-quran dan sunnah Nabi, karena dengan teraturnya mu'amalah, penghidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya, pernatahan dan dendam tidak akan terjadi.¹

Sesuai dengan aktifitas seorang muslim, maka hubungan yang bersifat mu'amalah tidak terlepas sama sekali dengan masalah-masalah ketuhanan karena apapun aktifitasnya di dunia ini senantiasa dalam pengabdian kepada Allah SWT.

¹ H.Sulaiman Rasyid. *Fiq Islam* (Bandung : CV Sinar Baru 1998) hal.262

Islam menganjurkan umatnya memproduksi dan berperan dalam kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan bentuk bentuk produksi lainnya. Islam memberkati pekerjaan dunia dan menjadikannya sebagai ibadah.

Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komoditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Timbulnya persoalan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara semuanya disebabkan oleh kelangkaan (*scarcity*) sumber daya manusia (*human resources*) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relative tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti ini manusia hendaknya membuat skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumbet daya alamnya.²

Untuk bangsa Indonesia sendiri pertanian sudah menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya, ini dapat dilihat dari meyoritas masyarakatnya yang menggantungkan ekonomi keluarganya pada sektor pertanian. Dari sekian banyak masyarakat yang menyandarkan kehidupan keluarganya pada sector perkebunan adalah salah satunya pada perkebunan karet

² Sadono Sukimin, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada) hal.

terutama yang ada dipulau Sumatera. Bahkan karet tidak hanya menjadi sandaran hidup keluarga, akan tetapi sudah menjadi salah satu produk ekspor dalam *income* Negara .

Di kabupaten kuantan Singingi yang penduduknya mayoritas petani, karet sudah menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja tidak semua penduduk di sini mempunyai lahan ataupun kebun karet. Sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan atau kebun karet yang cukup luas, yang di istilahkan dengan induk semang sedangkan pekerja (penyadap) di namakan dengan induk semang. Dari kegiatan ekonomi kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan mekanisme pengelolaan dan kesepakatan mereka, yang mana pembagian itu seperti dibagi dua ataupun juga bagi tiga.

Namun dalam pembagian bagi hasil ini kadang tidak selamanya berjalan sesuai dengan kesepakatan, ada juga penyadap merasa dirugikan oleh yang punya kebun karet, contohnya pak Marwan yang menyadap karet di kebun pak Nurdin, menurutnya (pak Marwan) setiap pembagian hasil, selalu bagian dia di potong atau di kurangi dari jumlah yang seharusnya ia terima karena semua hasil penjualan karet terlebih dahulu di berikan ke Pak Nurdin sebagai pemilik kebun karet.³ Hal ini juga dibenarkan oleh pak Nurdin selaku pemilik kebun, “ memang saya mengurangi bagian dia tapi sekali-kali “, tuturnya tanpa alasan⁴. Berbedda

³ Marwan, *Wawancara Pribadi* (Simandolak, 10 Pebruari 2008)

⁴ Nurdin, *Wawancara Pribadi* (Simandolak, 11 Pebruari 2008)

dengan pembagian yang di lakukan oleh pak Edi kepada anak buahnya (anak semang) yang bernama Munap, dalam pembagian hasil, ia menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya langsung kepada pak Munap sebagai penyadap karet, di sini hanya dituntut kejujuran saja tutur pak Edi.⁵

Dalam ekonomi Islam, bagi hasil merupakan salah satu tuntunan untuk membawa masyarakat ketataran kehidupan yang layak karena suatu sistem ekonomi yang parsipatif yang memberikan akses fair dan adil ke seluruh lapisan masyarakat.⁶

Bagi hasil juga merupakan salah satu langkah yang inovatif dalam transaksi Ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang efektif untuk mencegah potensi terjadinya konflik kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu ketidakadilan sosial ekonomi yang terjadi dari menumpuknya kekayaan serta terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada pihak-pihak tertentu saja dengan sendirinya lebih dapat diatasi.

Secara teknis bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal (*participatori loan*) atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal

⁵ Edi, Wawancara Pribadi (Simandolak 11 Pebruari 2008)

⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup Peluag, Tantangan dan Prospek* (Jakarta, alvabet 2000) hal. 94

merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Dan Allah tidak akan menetapkan segala bentuk akad, melainkan untuk dan terciptanya kemaslahatan serta terbendungnya kemiskinan.

Untuk itu, berdasarkan fenomena di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul : **“PRAKTEK BAGI HASIL KARET DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Studi Kasus di Desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang melatar belakangi kondisi masyarakat Kuantan Singingi diatas, khususnya praktek bagi hasil di bidang perkebunan karet, dalam penulisan ini penulis membatasi kajian rumusan masalah sebagai berikut :

1. bagaimanakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, menguntungkan kedua belah pihak serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial mereka ?

3. Apakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah relevan dengan perspektif ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, menguntungkan kedua belah pihak serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial mereka .
3. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak kecamatan Benai kabupaten Kuantan Singingi sudah relevan dengan perspektif ekonomi Islam.

Adapun manfaatnya adalah :

1. Menambah khasanah pengetahuan di bidang ekonomi Islam khususnya dalam bagi hasil Pertanian
2. Semoga dapat menjadi kajian dan informasi bagi birokrasi dan masyarakat Kuantan Singingi dalam memperkaya konsep ekonomi kerakyatan terutama masyarakat di desa Koto Simandolak
3. Supaya dapat menjadi rujukan/ referensi untuk penelitian serupa dalam lingkup yang lebih luas

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun karet (induk semang) dan penyadap karet (anak semang). Sedangkan objeknya adalah praktek bagi hasil karet dalam perspektif ekonomi Islam

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemilik kebun karet yang menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk menyadap karetnya yang berjumlah 10 orang dan penyadap karet di kebun orang yang berjumlah 15 orang di desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat jumlah populasi yang terbatas maka penulis mengambil semuanya untuk di jadikan sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh langsung dari responden yaitu penyadap dan pemilik kebun karet di desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

b. Data Sekunder

Yaitu data yang di peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung kelokasi desa yag menjadi objek penelitian terutama mengenai sistem bagi hasil karet
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada penyadap karet, pemilik kebun karet, tokoh masyarakat, kepala desa tempat penulis meneliti.

6. Analisa Data

Setelah semua data yang di perlukan berhasil di kumpulkan, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Analisa Deduktif

Penulis menggunakan data atau fenomena yang bersifat umum kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Analisa Induktif

Penulis melakukan pengalisaan data atau fenomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan di bahas, tulisan ini di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I :** Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan serta sistematika penulisan.
- BAB II:** Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi geografis, demografis dan sosial budaya masyarakat desa Koto Simandolak
- BAB III:** Tinjauan umum bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam yang meliputi pengertian ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam serta bagi hasil dalam ekonomi Islam.
- BAB IV:** Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi, sistem bagi hasil karet dan ide-ide Koto Simandolak, pengaruh sistem bagi hasil karet terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat desa Koto Simandolak serta kesesuaian bagi hasil karet di desa Koto Simandolak dengan perspektif ekonomi Islam.
- BAB V :** Kesimpulan dan saran, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA KOTO SIMANDOLAK

A. Keadaan Geografis

Desa koto Simandolak merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian ini maka penulis akan menerangkan batas-batas wilayah desa Koto Simandolak sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tebing Tinggi
- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tanjung Baru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pulau Ingu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan Siberakun

Desa Koto Simandolak ini mempunyai luas 6.680 Ha, terdiri dari 2.175 Ha lahan pertanian dan 4.505 Ha pemukiman penduduk, terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Koto, dusun Gurun dan dusun Baru, jarak tempuh ke kecamatan yaitu 5 Km, sedangkan jarak ke kabupaten adalah 20 Km yang biasanya ditempuh dalam jarak waktu 30 menit dengan menggunakan kendaraan umum.

B. Keadaan Demografi

Desa Koto Simandolak terdiri dari 3 dusun / RW, serta 9 RT, yaitu :

1. Dusun/RW 01 yaitu dusun Gurun yang meliputi 3 RT
2. Dusun/RW 02 yaitu dusun Koto, yang Meliputi 3 RT
3. Dusun/RW 03 yaitu dusun Baru, juga terdiri dari 3 RT

Keadaan bangunan di desa Koto Simandolak tersusun sesuai dengan keadaan daratannya yang sebahagian besar terletak mengikuti pinggiran jalan raya lintas kecamatan. Kemudian dalam segi penerangannya, keadaan desa Koto Simandolak sebahagian besar sudah di aliri listrik dari PLN, namun ada juga yang belum di aliri oleh aliran listrik, contohnya dusun Baru yang pada malam harinya terlihat gelap dan sunyi, mereka menggunakan pelita atau lampu *colok* sebagai alat penerangnya, bagi mereka yang mampu maka mereka dapat menggunakan disel atau genset sebagai penerangannya.

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2007/2008, penduduk desa Koto Simandolak berjumlah 1.419 orang atau 367 kepala keluarga (KK). Penduduk desa Koto Simandolak merupakan masyarakat yang majemuk, hal ini dapat dilihat hampir diseluruh aspek, baik dari segi umur, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Hal ini seperti tertera pada tabel-tabel berikut:

Table I
Jumlah Penduduk Koto Simandolak
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2007/2008

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	690	48.62%
2	Perempuan	729	51.37%
Jumlah		1419	100%

Sumber : Data dari Kantor Kepala Desa Koto Simandolak tahun 2008

Mayoritas penduduk di desa Koto Simandolak berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 729 jiwa. Dengan demikian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 690 jiwa, yang berarti jumlah penduduk seluruhnya 1.419 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia (umur) dapat dilihat pada tabel berikut:

Table II
Jumlah Penduduk Menurut Ketentuan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	0-10 Tahun	204	14.37 %
2	11-20 Tahun	275	19.37 %
3	21-30 Tahun	253	17.82 %
4	31-40 Tahun	180	12.68 %
5	41-50 Tahun	250	17.61 %

6	51-60 Tahun	100	7.61 %
7	61 Tahun keatas	157	11.06 %
Jumlah		1419	

Sumber : Data dari Kantor Kepala Desa Koto Simandolak tahun 2008

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwa mayoritas penduduk desa Koto Simandolak adalah pemuda dan pemudi yang berusia berkisar antara 11-20 tahun yang berjumlah 275 orang atau 19.37 %, kemudian diikuti umur 21-30 tahun sebanyak 253 orang atau 17.82 %, disusul umur 41-50 tahun yang berjumlah 250 atau 17.61 %, selanjutnya umur 00-10 tahun berjumlah 204 orang atau 14.37 %, umur 31-40 tahun berjumlah 180 orang atau 12.68 %, dilanjutkan dengan umur 61 tahun keatas yag berjumlah 157 orang atau 11.06% dan urutan yang paling rendah atau yang paling sedikit adalah umur 51-60 tahun yang berjumlah 100 % orang atau 7.04 % dari jumlah penduduk.

C. Keadaan Sosial Budaya

1. Perlembagaan Pemerintah

Desa Koto Simandolak dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari 3 Dusun atau Rukun Warga (RW) dan 9 rukun tetangga (RT), semuanya bekerja sesuai dengan batas wilayah kerja yang telah ditentukan.

Dalam melaksanakan pemantauan desa dan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa, maka pemerintahan daerah (PEMDA) KUANSING membentuk suatu lembaga. Lembaga itu berupa Badan Perwakilan Desa (BPD), bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk memajukan desa. Adapun personalia pemerintahan desa Koto Simandolak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III
Personalia Pemerintahan desa Koto Simandolak

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ajasmi	Kepala Desa	
2	Ordenianto.S.Ag	BPD	
3	Ajasman	LKMD	
4	Akmal hidayah	Sekretaris Desa	
5	Erfandis, S.Pd	RW.01	
6	Nazaruddin	RT.01	
7	Lukman Efendi	RT.02	
8	Maramis.BA	RT.03	
9	Ajasri	RW.02	
10	Yusuf Qardhawi	RT.01	
11	Sopyan Suri	RT.02	
12	Lasim	RT.03	
13	Supardi	RW.3	

14	Badar	RT.01	
15	Siman Hamid	RT.02	
16	Ajasri	RT.03	
Jumlah			

Sumber : Data dari Kantor Kepala Desa Koto Simandolak tahun 2008

2. Keagamaan

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan suatu landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang bersifat non empiris yang di percaya dan digunakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama, masyarakat desa Koto Simandolak hidup dengan rukun dan penuh kedamaian, karena perbedaan diantara manusai tidaklah berarti, bahkan dengan perbedaan itu manusia akan menjadi sempurna, karena akan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Penduduk di desa Koto Simandolak ini 100 % beragama Islam, karena memang nenek moyang mereka beragama Islam. Kepala desa Koto Simandolak mengatakan dalam wawancaranya degan penulis, “ sesuai dengan

data sensus penduduk tahun 2007/2008, penduduk didesa ini (Koto Simandolak) beragama Islam.¹

Sebagaimana tersebut di atas bahwa masyarakat di desa Koto Simandolak ini adalah beragama Islam, maka dengan sendirinya lembaga keagamaan yang terdapat di desa Koto Simandolak hanyalah lembaga keagamaan Islam saja.

3. Pendidikan

Kwalitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan kwalitas sumber daya manusia yang mantap dan cakap maka aka sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang lebih baik.

Seiring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan mendapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberi kn pendidkkan kejenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan formal itu seperti Sekolah Dasar (SD) sampai kepada pendidikan tingkat sarjana. Sedangkan pendidikan non formal, masyarakat

¹ Ajasmi (kepala desa), *Wawancara Pribadi*, Koto Simandolak, 10 Pebruari 2008

desa Koto Siamndolak di arahkan kepada pendidikan agama seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

Di desa Koto Simandolak terdapat beberapa sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti pada tabel berikut:

Tabel IV
Sarana dan Pra Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Taman kanak-kanak	1	
2	Sekolah Dasar	2	
3	Madrasah Diniyah Awaliah	1	
4	Sekolah Menengah Pertama	1	
5	Madrasah Aliyah	1	
Jumlah		6	

Sumber : Data dari kantor kepala desa Koto Simandolak

4. Organisasi Sosial

Adapun sarana sosial yang dimiliki oleh desa Koto Simandolak hanya terdiri dari puskesmas saja yang jumlahnya 1 bangunan dan di bantu dengan 1 orang dokter yang membuka praktek dirumahnya². Dalam keadaan yang sangat minim ini, masyarakat tentunya akan sangat sulit berobat dengan

² Akmal Hidayah (Sekdes), *Wawancara Pribadi*, Koto Simandolak 11 Pebruari 2008

pelayanan yang memuaskan, sehingga masyarakat sering menggunakan obat-obatan alam.

5. Bidang Olahraga

Di dalam raga yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Dalam kaidah ini tentunya kita dapat mencerna bahwasanya kesehatan itu harus dijaga, dengan berolahraga salah satunya. Maka dari itu masyarakat menyadari betul pentingnya olahraga, hampir setiap hari mereka berolahraga, baik itu sepak bola, voli, takraw dan olahraga lainnya. Sehingga setiap tahunnya diadakan turnamen dan mengundang klub-klub dari luar daerah dan bahkan Kecamatan lain di Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Mata Pencaharian

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Koto Simandolak mempunyai berbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahliannya masing-masing.

Menurut Akmal Hidayah (Sekretaris Desa), bagi masyarakat Koto Simandolak ini mata pencarian mereka bermacam-macam seperti, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru (Tenaga Pengajar , bertani dan nelayan. Namun tidak jarang diantara mereka yang berdagang dan menjadi tukang dan buruh bangunan. Hal terpenting bagi mereka adalah pekerjaan itu halal dan dapat

menghidupi keluarga mereka.³. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	235	32.41 %
2	Nelayan	25	3.44 %
3	Pedangan	50	6.89 %
4	Pertukangan	75	10.34 %
5	Guru	200	27.58 %
6	Pegawai Negeri Sipil	140	19.31 %
Jumlah		725	100 %

Sumber: Data dari kantor Kepala desa Koto Simandolak Tahun 2007/2008

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat koto Simandolak adalah bertani yaitu sebanyak 235 orang atau 32.41 %, kemudian diikuti dengan Guru yaitu sebanyak 200 orang atau 27,58 %, selanjutnya pegawai negeri sipil 140 orang atau 19,31 %, selanjutnya pertukangan 75 orang atau 10,34 %, dan pedagang sebanyak 50 orang atau 6,89 % serta yang terakhir adalah Nelayan yaitu 25 orang atau 3,44 %.

7. Adat Istiadat

³ Akmal Hidayat (Sekdes), *Wawancara Pribadi*, Koto Simandolak 11 Pebruari 2008

Adat istiadat tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun dan menjadi tingkah laku sehari-hari dalam hidup dan kehidupan serta pergaulan.

Asas dari adat istiadat memelihara keseimbangan dalam hubungan kerukunan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Peranan adapt istiadat dari dahulu dampai sekarang, masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tentunya dengan tidak mengurangi bahwa masyarakat masih tetap mematuhi peraturan-peraturan, perundang-undangan dan tetap menjalankan syari'at agama Islam. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta syari'at agama Islam, adapt istiadat tetaplah sangat diperlukan.

Pada dasarnya adat istiadat yang terdapat di desa Koto Simadolak tidak jauh beda dengan adapt istiadat melayu pada daerah-daerah lainnya. Adapun adat istiadat itu antara lain ⁴:

a. Pernikahan

Sebelum melaksanakan upacara pernikahan, terlebih dahulu masyarakat harus melalui langkah-langkah awal, seperti merisik yaitu berkumpulnya kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan hal ini dilakukan dalam rangka proses pengenalan, baik untuk kedua calon maupun antara kedua calon maupun antara keluarga yang satu dengan lainnya.

⁴Hasan Basri (Tokoh masyarakat), *Wawancara Pribadi*, Koto Simandolak 11 Pebruari 2008

Hal ini dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan dan merupakan salah satu cara mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap proses pelamaran dan *'alimatul ursnya*.

b. Khatam Qur'an

Upacara Khatam Ql-Qur'an ini biasanya dilakukan dalam acara khitanan atau pun pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa mereka bias membaca Al-qur'an.

c. Kenduri

Kenduri biasanya dilakukan dengan cara pembacaan surat yasin, *tahli, tahmid* dan *tasbih* serta do'a bersama. Hal ini dilakukan pada upacara kenduri karena ada kematian (*ta'ziah*), juga pada upacara hajatan baik itu syukuran, nazar maupun aqiqah. Dengan tujuan diadakan ini supaya segala do'a dan permohonan dapat dikabulkan oleh Allah SWT.

d. Pacu Jalur

Paju jalur merupakan salah satu tradisi yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka, hal ini biasanya diadakan sekali setahun setiap bulan agustus. Masyarakat desa Koto Simandolak Khususnya, rela menghabiskan waktunya demi menonton pacu jalur tersebut dan tidak jarang dari mereka yang menabung jauh hari sebelumnya hanya untuk biaya nonton pacu jalur.

BAB III

TINJAUAN UMUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam pemikiran ekonomi barat menterjemahkan ekonomi sebagai pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan, kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.

Secara etimologi kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu *oikonomia*, *oikos* berarti rumah dan *nomos* berarti tangga, karena itu ekonomi di terjemahkan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga¹.

Sedangkan menurut Paul A. Samuel, salah seorang ahli ekonomi terkemuka memberikan definisi, ilmu ekonomi merupakan studi tentang individu dan masyarakat dalam pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan sumber-sumber terbatas, tetapi dapat di gunakan dalam berbagai cara untuk kepentingan konsumen sekarang dan dimasa yang akan datang individu dan golongan masyarakat².

Dari pengertian tentang ekonomi yang dikemukakan oleh para pemikir barat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa ekonomi adalah kegiatan yang di

¹ Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta, Media Global Edukasi, 2004) hal.3

² Sodono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* , (Jakarta, Raja Wali Pers), hal.10

dalam pelaksanaannya hanya berlaku hukum positif saja, bahwa kegiatan ekonomi harus berjalan sesuai apa adanya tanpa harus memikirkan akibat yang akan di timbulkan dari kegiatan ekonomi tersebut. Bagi mereka bahwa hukum normative tidak bisa di gabungkan dalam kegiatan ekonomi, karena tidak terdapat di dalamnya nilai-nilai atau siraman-siraman agama.

Menurut M.A Mannandalam bukunya yang berjudul TEori dan Praktek Ekonomi Islam menyatakan bahwa “Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam³.

Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah di tentukan, aturan-aturan tersebut di antaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara bhatil; tidak berlebihan/melampaui batas; tidak dizalimi dan menzalimi; menjaukan diri dari unsure-unsur riba, *maisir* (perjudian) dan *gharar* (ketidak jelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Islam juga mendorong umatnya/ pemeluknya untuk bekerja, hal tersebut disertai jaminan dari Allah SWT bahwa ia menetapkan rezeki setiap makhluk yang di ciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis⁴.

³ M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi*, terjemahan dari judul aslinya, *Islamic Economic Theory and Practice*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 19

⁴ Safi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001) hal. 11-12

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan, maka ekonomi Islam, dengan mengakses kepada aturan-aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak lepas dari nilai yang secara vertical merefleksikan moral yang baik dan secara horizontal memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya⁵.

Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya semata memenuhi kebutuhan materi saja akan tetapi juga mencakup kebutuhan sipiritual. Maka disinilah akan ditemukan peranan agama dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam manusia tidak bisa berbuat semaunya dalam melakukan kegiatan ekonomi Karen adi awasi ataupun dikontrol oleh rambu-rambu yang sudah diatur oleh agama.

Ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia sedangkan agama merupakan seperangkat aturan yang di turunkan untuk membimbing atau mengatur perilaku manusia. Itu artinya bahwa bidang-bidang pembahasan dalam ekonomi merupakan bagian dari aturan-aturan agama.

Islam sendiri dalam ajaran-ajarannya banyak sekali mengandung ajaran tentang ekonomi. Kita dapat menemukan dalam beberapa ayat Al-qur'an dan Sunnah tentang ekonomi seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Hijr 20-21:

⁵ Bambang R.Rustam,*Perbankan Syariah*,(Pekanbaru, Mumtaz Cendekiawan Press,2004)hal.1

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

Artinya : Dan kami Telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.

Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.(QS.Al-Hijr.20-21)⁶

Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang Allah berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari'at Allah SWT. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan ekspor tidak terlepas dari titik tolak ke Tuhanan dan bertujuan akhir kepada Tuhan.⁷

Ekonomi dalam pandangan Isla bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini, akan tetapi hanya suatu perlengkapan hidup, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan penunjang bagi aqidah dan bagi misi yang di embannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak semata ilmu ekonomi yang positif. Dalam ekonomi Islam, aspek-aspek yang normative dan positif itu saling berkaitan erat, sehingga setiap upaya untuk

⁶ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemah*, (Semarang, CV. As-syifa, 1999), hal. 392

⁷ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997) hal. 31

memisahkannya akan berakibat menyesatkan dan tidak akan produktif.⁸. hal ini menjadikan ruang lingkup ekonomi Islam lebih luas dan komprehensif, karena ia tidak hanya bicara tentang motif akan tetapi juga tentang perilaku, lembaga dan kebijakan. Ekonomi Islam mempelajari perilaku manusia apa adanya, namun ia juga mempunyai visi tertentu dimasa yang akan datang dimana perilaku manusia harus diarahkan kepadanya. Pendekatan seperti inilah yang merupakan ciri yang menonjol dari ekonomi Islam.

Dari uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah studi tentang problem-problem ekonomi dan institusi yang berkaitan dengannya. Atau ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencari ridho Allah. Dalam ekonomi Islam bahwa hukum normative sama sekali tidak bisa di pisahkan dari hukum positif, dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi harus ada nilai-nilai agama yang mengaturnya dan itulah yang menjadikannya perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Konvensional atau ekonomi lainnya.

B. Prinsip-prinsip dan Sumber-sumber Ekonomi Islam

a. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan bersama pribadi, akan tetapi juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada keselarasan dan

⁸ MA.Mannan,*op.cit.* hal.10

keserasian, bukan persaingan. Dalam prinsip ekonomi Islam harus ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan melahirkan kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi mengajarkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam nuansa hubungannya dengan Tuhan. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, maksimasi kepuasan dan keuntungan, ada suatu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, kapasitas untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengamalan Al-qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat atas kesamaan dan kerjasama atau *equality and co operation*. Konsekuensi langsung dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa Dia telah menjadikannya itu semua untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan

untuk menggunakan dan mendistribusikan secara adil sumber daya-Nya di bumi⁹.

2. Prinsip Kerja dan Produktivitas

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa seseorang harus profesional dengan jumlah dan kategori pekerjaan yang di kerjakannya. Harus ada penghitungan misalnya “ jam orang kerja” atau *man-hours of work* dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan.¹⁰

3. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Ini menegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan perorangan. Unsur utama dari pendapatan nasional dan transfer kekayaan yang di gunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, *ghamimah*, *fai*, *kharaj* dan *'ushr*. Pada tingkat yang lebih makro, hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan perorangan serta harus berlangsung secara fundamental atas dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang

⁹ Muhandis Natadiwirja, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta, Granada Press, 2007) hal. 21

¹⁰ *Ibid*, hal. 21

produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja atau *employment* dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

11

4. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan atau kebebasan perorangan dengan kepentingan umum yang harus di pelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹² Dan Allah SWT juga tidak suka kepada umat-Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam al-Qur'an surat al-'a'raf ayat 31 yang berbunyi :

﴿يَبْنَىْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا
وَشَرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

¹¹ *Ibid*, hal.22

¹² AM.Syaefuddin,*Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta,CV.Rajawali Press,1987)hal.66

Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(QS.Al-a'raf : 31)¹³

Ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha), dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan, semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi.¹⁴

b. Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa sitem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitik beratkan pada nilai-nilai yng terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktifitasny mengnharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-noram yang telah di atur oleh Islam, dapat di kemukakan disini beberapa sumber hokum ekonomi Islam yaitu *Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'*¹⁵.

¹³ Departemen Agama,*Op.cit*.hal.225

¹⁴ Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*,terjemahan dari judul asli,*Economic Doctrines of Islam*,oleh Soeroyo,(Yogyakarta, Dana Bkahti Wakaf,1995)hal.12

¹⁵ MA. Mannan.*Op.Cit*.hal.28

1. Alqur'an

Al-quran merupakan sumber pokok ajaran Islam. Ajaran yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah ekonomi. Definisi Alquran sendiri adalah “ kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amal ibadah bila membacanya¹⁶.

Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik politik sosial maupun ekonomi. Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat penting, Karena ekonomi merupakan faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika di dalam Al-quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ekonomi.

Firman Allah SWT ;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁶ Abdul Wahaf Khalaf, *Ilmu usul Fiqh* (ter), Masdar Helmi dari judul asli “*Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung, Gema Insani Press, 1997) hal. 39

Artinya : Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.(QS.Al-Baqarah: 275)¹⁷

Dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagimu.(QS.Al-Baqarah: 168)¹⁸

2. As-Sunnah

Menurut istilah syara', assunnah ialah suatu yang dating dari
Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau *taqrir* (persetujuan)",
assunnah qauliyah (sunnah ucapan) ialah hadits-hadits Rasulullah SAW
yang berupa ucapan di dalam berbagai tujaun dan permasalahan¹⁹.

¹⁷ Departemen Agama, *Op.cit.*

¹⁸ Departemen Agama, *Op.cit.* hal.41

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf. *Op.cit.* hal.65

Salah satu bukti kehujjahan assunnah atau hadits adalah firman Allah SWT;

مَّن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

Artinya : Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka (QS.An-Nisa': 80)²⁰

Ditinjau dari kehujjahannya dan rujukan di dalam pembentukan hokum Islam, maka hubungan assunnah dengan Alquran adalah sebagai urutan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-quran, yakni sebagai rujukan para mujtahid dalam menentukan hokum jika memang tidak terdapat dalam Al-quran. Dalam hal ini Al-quran merupakan sumber hokum pokok dan pertama bagi pembentukan hokum Islam. Oleh karena itu jika Al-quran dijumpai nash mengenai hokum, maka nash itu harus di ikuti, namun jika di dalam Al-quran tidak di jumpai, maka harus kembali

²⁰ Departemen Agama, *Op.cit.* hal.132

kepada sunnah. dan apabila di dalam sunnah terdapat atau di jumpai hukum yang pasti, maka assunnah di ikuti²¹.

Adapun hadits yang berbicara tentang ekonomi antara lain adalah hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari yang berasal dari Ibn Abbas yang berbunyi;

إذا اختلف البيعان فلقول ما قال البائع فإما أن يرضى المشتري أو يترد أن البيع. (رواه أبو حنيفة)

Artinya : Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di tangan penjual. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual beli batal (HR.Abu Hanifah)²²

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian²³.

Oleh karena itu, jika terdapat suatu kejadian yang di hadapkan kepad seluruh imam mujtahid pada waktu itu, maka kesepakatan mereka di sebut hukum ijma'. Setelah itu ijma' dianggap sebagai sumber hukum tentang persoalan tersebut. Di dala defenisi ini hanyadi katakana setelah

²¹ *Ibid*.hal 71

²² Muhammad faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad* (terj),Aziz Salim Basyaril dari judul asli" *Qobasun Min Nuri Muhammad*,(Jakarta, Gema Insani 1991).hal.194

²³ Abdul Wahab Khalaf,*Op.cit*.hal 81

Rasulullah SAW wafat, karena ketika Rasulullah masih hidup, hanya beliaulah tempat bertanya dan kembalinya syari'ah Islam.

Bukti ke hujjahan ijma' adalah firman Allah SWT;

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ
رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا
قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya : Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri, di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri).kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS.An-Nisa': 83)²⁴

C. Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu langkah *inovatif* dalam transaksi ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh

²⁴ Departemen Agama, *Op.cit.*

kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat di pandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara kaya dan yang miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, prinsip bagi hasil tersenggara melalui mekanisme penyertaan modal (*psrticipatori loan*) atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

2. Macam-Macam Bagi Hasil

Adapun macam-macam bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan empat akad yaitu:

a. *Musyarakah*

musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵.

²⁵ Muahammad S.Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta, Tazkia Institut,1999)hal.143

Musyarakah ada dua bentuk yaitu *musyarakah* pemilik dan *musyarakah* akad (kontrak), *musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun *musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan mengatsi kerugiannya secara bersama-sama²⁶.

b. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha²⁷.

Mudhrabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak,

²⁶ *Ibid*.hal.144

²⁷ *Ibid*.hal.149

sedangkan apabila terjadi kerugian maka di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola²⁸. Begitu juga dalam hal mudharabah pertanian, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk di kelola dengan imbalan hasilnya di bagi sesuai dengan kesepakatan.

Mudharabah sendiri di bagi kepada dua macam yaitu ; mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mall dengan mudharib yang cakupannya cukup luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu daerah usaha. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah yang mana mudharib dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha oleh shahibul mall, pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan si shahibul mall dalam memasuki dunia usaha.²⁹

b. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen³⁰.

c. Musaqah

²⁸ Safi'I Antonio, *Op.cit*, hal.95

²⁹ Syafi'I Antonio, *Op.cit*, hal 97

³⁰ Syafi'I Antonio, *Op.cit*, hal.99

Secara sederhana *musaqah* di artikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman tua dengan imbalan bagian dari hasil yang di peroleh dari tanaman tersebut, yang di maksud dengan tanaman dalam mu'amalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya³¹

Ulama malikiyah menyatakan sebagai mana yag di kutip dari bukunya Nasroen Harun bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, apel dan anggur. Dengan syarat : (a). akad musaqah dilakukan sebelum buah itu layak panen, (b). tenggang waktu yang di tentukan jelas, (c). akad yang di lakukan setelah tanaman itu tumbuh, (d). pemilik kebun tersebut tidak mampu mengelola dan mengurusnya³².

D. Bagi Hasil Petanian Dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, tanah merupakan milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, karena itu pemilik dan penguasaan atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan yang mengesampingkan sebahagian besar masyarakat dalah bertentang dengan jiwa Al-quran. Dalam ekonomi Islam tiada seorang pun yang dapat menuntut pemilik tanah secara mutlak, karena tanah itu secara mutlak adalah milik Allah SWT.

³¹ Amir Syarifuddi, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media, 2003) hal. 243

³² Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hal. 284

Nabi sendiri tidak pernah mendorong adanya sitem atau tuan tanah dalam bentuk apapun yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, karena beliau berusaha mencamkan arti pentingnya penggarapan. Nabi SAW bersabda;

عن جابر عبد الله رضي الله عنهما : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له

ارض فليزرعها اولي زر عها اخا ه ولا يكرها (رواه مسلم)

Artinya : Dari Jabir Ibn Abdillah semoga meridhoi Allah untuk keduanya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda; barang siapa di antara kalian yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau menyuruh saudaranya untuk menanaminya dan janganlah menyewakannya” (H.R. Muslim)³³

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa tanah tidak boleh di telantarkan, jika tidak sanggup menggarapnya sendiri maka serahkan ke pada orang lain untuk di garap, dengan demikian nantinya akan terjalin kerja sama antara dua belah pihak dalam penggarapan sebidang tanah dan hasil penennya di bagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaannya.

Dalam ekonomi Islam, pengelolaan dan bagi hasil pertanian di sebut dengan *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Namun terdapat sedikit perbedaan diantara ketiganya.

Menurut Afzalur Rahman apabila tanah disewakan dengan sistem bagi hasil, disebut *muzara'ah* dan jika kebun disewakan dengan cara yang sama

³³ Muhammad Nashiruddin Al-abani, *Ringkasan Shaiih Muslim*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2003), hal.683

disebut *musaqah*³⁴. Al San'ani mempunyai pendapat yang sama dengan Afzalur Rahman mengenai *musaqah*, hanya saja Al San'ani masih membedakan antar *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah penggarapan lahan dengan mendapatkan bagian dari hasil penggarap dengan ketentuan benih/ bibit dari pemilik kebun/lahan, dan apabila bibitnya dari penggarap maka disebut *mukhabarah*.³⁵

Menurut imam Syafi'I yang di kutip dari bukunya Nasroen Haroen mendefenisikan mukhabarah dengan “ pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian di sediakan oleh penggarap”, sehingga dalam mukhabarah bibit yang di tanam di sediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam muzara'ah bibit yang akan di tanam di sediakan oleh pemilik lahan³⁶.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa muzara'ah adalah kerja sama dalam pengelolaan tanah yang bibitnya disediakan oleh pemilik tanah/lahan dan mukhabarah adalah kerja sama pengelolaan tanah yang bibitnya dari penggarap, sedangkan musaqah adalah si penggarap hanya bertugas untuk memelihara, menjaga dan menyirami lahan pertanian saja.

Walaupun demikian, ada bentuk-bentuk yang di larang dalam pengelolaan tanah dalam ekonomi Islam, berikut akan di jelaskan bentuk-bentuk apa saja yang terlarang dan yang boleh oleh para ahli fiqih ;

³⁴ Afzalur Rahman, *Op.cit.*, hal.260

³⁵ Al San'ani, *Subul Al-Salam*, (Bandung, Dahlan, tt), hal.77

³⁶ Nasroen Haroen, *Op.cit.* hal.276

Bentuk-bentuk bagi hasil yang terlarang adalah³⁷;

1. suatu bentuk perjanjian yang di tetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus di berikan kepada pemilik lahan.
2. apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan yang menghasilkan, maka bagian tersebut untuk pemilik lahan.
3. ketika petani dan pemilik lahansepakat membagi hasil tanah, tapi satu pihak menyediakan bibit dan lainnya menyediakan alat-alat pertanian.
4. perjanjian pengelolaan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pada pihak yang lain.
5. bagian seseorang di tetapkan dalam bentuk jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh.
6. ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus di serahkan kepada satu pihak selain dari bagian yang sudah ditetapkan.
7. adanya hasil panen lain (selain dari pada yang di tanam di lahan atau di kebun) harus di bayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Adapun bentuk bagi hasil yang sah adalah³⁸ :

1. Perjanjian kerja sama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya

³⁷ Afzalur Rahman, *Op..cit.* hal.213-215

³⁸ Nasroen Haroen, *Op..cit.* hal.279

menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.

2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
3. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil panen.
4. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, pekerja dan alat pertanian dari petani sehingga menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani.
5. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat dari hasil panen.

BAB IV

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL KARET DI DESA KOTO SIMANDOLAK

A. Sistem Bagi Hasil Karet di Desa Koto Simandolak

Manusia di dorong untuk menggunakan kemampuan ataupun potensi yang ada didalam dirinya, akan tetapi tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang tersedia di mana tempat ia tinggal. Sehubungan dengan ini, masyarakat desa Koto Simandolak pun telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi serta sumber daya alam yang tersedia yaitu pertanian, dalam hal ini masyarakat desa Koto Simandolak mengembangkan usaha/ membudi dayakan karet sebagai sumber perekonomian mereka.

Walaupun sebenarnya tidak semua masyarakat yang mempunyai kebun karet, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya dan ada pula yang mempunyai kebun karet akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Untuk menghindari terjadinya ketelantaran kebun dan lahan, maka mereka melakukan akad kerja sama untuk memanfaatkan kebun karet tersebut.

Dari wawancara yang penulis lakukan terdapat dua kategori terhadap kebun karet ini. Pertama, menyadap karet sebagai gaya hidup, kedua; menjadikan kebun karet sebagai landasan dan sumber kehidupan utama keluarga. Sehingga di

dalamnya terkandung aspek sosial, yang mana semakin banyak kebun karet nya semakin tinggi pula tingkat kehidupan sosialnya di masyarakat¹..

Dalam mengelola lahan pertanian antar satu daerah dengan daerah lainnya tentu berbeda, karena dalam pengelolaannya tertentu di sesuaikan dengan keadaan tanah dan kebutuhan yang di kehendaki oleh manusia itu sendiri, begitu juga halnya dengan pengolahan dan akad kerja sama yang terdapat di desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam sistem pertanian karet di desa Koto Simandolak sedikit berbeda dengan sistem pertaniannya seperti ladang dan sawah, karena dalam sistem ini lahannya sudah siap untuk di garap (di sadap) tidak seperti ladang atau sawah yang dimulai dari pembibitan terlebih dahulu.

Untuk pembahasan dalam bagian ini penulis akan menyampaikan sistem bagi hasil karet masyarakat desa Koto Simandolak dengan maksud untuk mengetahui lebih jelas bagaimana mereka menggunakan sitem bagi hasil pertanian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah bentuk-bentuk sistem bagi hasil karet yang di pakai oleh masyarakat desa Koto Simandolak ;

1. Sistem Sewa

Yang di maksud dengan sistem sewa adalah sistem yang di lakukan oleh pemilik kebun dan petani penggarap dalam penyewaan kebun secara tunai. Pemilik kebun menyewakan kepada petani penggarap, penggarap

¹ Abdul Qadir, *Wawancara Pribadi*(Koto Simandolak, 25 Mei 2008)

memberikan sejumlah uang sewa secara tunai yang telah ditentukan oleh pemilik kebun sebagai pengganti dari hasil kebunnya. Dengan demikian petani penyewa telah mempunyai hak untuk menggarap (menyadap) kebun karet tersebut.

Dalam sistem ini semua peralatan, pupuk dan obat-obatan ditanggung oleh petani penyewa begitu juga dari hasil pertaniannya semua menjadi milik petani. Pemilik kebun dalam hal ini tidak mendapat apa-apa kecuali uang dari hasil sewa kebun karet tersebut.

Pada sistem ini pemilik kebun menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh petani penyewa dan menentukan lamanya penyewaan. Ketentuan jumlah uang yang harus dibayarkan disesuaikan dengan kondisi karet dan harga karet, apakah karet unggul atau kalkulasi dan harga karet pada saat itu. Rentang waktu biasanya ditetapkan persemester atau per-6 bulan dan ada juga pertahunnya, apabila masa sewa telah berakhir maka petani penyewa harus mengembalikan kebun tersebut kepada pemilik kebun dan juga jika ia berkeinginan untuk tetap menyewanya kembali maka harus melakukan akad sewa kembali.

Akad sewa ini terjadi biasanya pemilik kebun bertempat tinggal di daerah lain dan ada juga karena tidak sempat mengurusnya dengan alasan dia mempunyai pekerjaan lain seperti guru dan pegawai Negeri sipil. Sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Anto, dia menyewakan kebun karet bapak Abdul untuk bisa ia garap.

Akad sewa yang dilakukan oleh masyarakat Koto Simandolak ini sebenarnya.

2. Sistem *Bagi Duo* (Paroan)

Yang dimaksud dengan sistem *bagi duo* ini adalah dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penyadap (penggarap) untuk di sadap. Adapun pembagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan mereka dan hal-hal yang mempengaruhi selama penggarapan tersebut.

Dalam sistem ini biasanya semua peratan di tanggung oleh petani penggarap/penyadap sedangkan yang berkaitan dengan keawetan kebun seperti pupuk, obat-obatan di tanggung oleh pemilik kebun. Sehingga dalam bagi hasil karet biasanya mereka bagi dua saja, seperti dalam sepekan (seminggu) misalnya dapat 100 kg karet, maka punya kebun/ lahan mendapatkan 50 kg dan petani penggarap pun mendapatkan 50 kg tapi ada juga melakukannya dengan perbandingan 60:40 /per bagian masing-masing.

Namun jika selama penggarapan berjalan, tiba-tiba petani penggarap sakit atau di timpa musibah, maka biasanya yang punya kebun menyuruh kerabat redekkan si penggarap untuk menyadap karetnya dan hasilnya pun tetap di bagi separoh untuk yang punya kebun dan separohnya lagi tergantung pada dua orang penggarap tersebut. Dan jika terjadi bencana alam seperti banjir misalnya atau kebakaran, maka petani

penyadapa tidak ada menanggung kerugian selama bencana itu terjadi tidak di sebabkan oleh kelalaian petani penggarap.

3. Sistem Bagian Batang

Adapun yang di maksud dengan bagian batang ini adalah akadnya hampir sama dengan sistem bagi dua (paroan) akan tetapi dalam pembagian ini pemilik kebun mengambil potongan dari batangnya (bagian batang) misalnya dalam sepekan kebun menghasilkan karet 100 kg, maka yang punya kebun memotong 10 kg dan sisanya baru di bagi dua. Rasio pemotongan bagian batang ini biasanya 1 kg per 10 kg namun ada juga hsnya $\frac{1}{2}$ kg per 10 kg, tergantung dari yang punya kebun. Seperti yang di jelaskan oleh Tamsir bahwa induk semangnya mengambil $\frac{1}{2}$ kg per 10 kg dari bagian batang, setelah itu baru di bagi dua.²

4. Sistem *Talobiah Takurang* (Lebih Kurang)

Dalam sistem ini pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap, namun tidak di tentukan bagi hasilnya. Petani penggarap boleh menyerahkan hasil kebun itu dalam sepekan berapa saja, karena dalam sistem ini sifatnya hanya tolong menolong dan membantu sesama manusia.

Sitem ini terjadi bisayanya pemilik kebun merasa kasihan melihat kondisi ekonomi petani penggarap sangat lemah/rendah sehingga pemilik kenyerahkan kebunnya untuk di garap dan juga biasanya terjadi

² Tamsir, *Wawancara Pribadi*, (Koto Simandolak, 25 Mei 2008)

karena pemilik kebun bertempat tinggal jauh dari lokasi kebunnya atau di daerah lainnya seperti Pekanbaru, Rengat dan tidak jarang di antara mereka alasannya karena tidak mempunyai kesempatan untuk menggarapnya karena mempunyai pekerjaan lain seperti Guru, Pegawai Negeri Sipil dan sebagainya.

Perlu di jelaskan bahwa pada sistem talobiah takurang ini agaknya berbeda dengan ketiga sistem sebelumnya, pada sistem ini di latar belakang semata-mata hanya untuk menolong petani penggarap, tidak seperti ketiga sistem sebelumnya yang merupakan suatu tujuan meningkatkan taraf kehidupan atas hasil yang di dapat.

5. Sistem Bagi Tiga

Yang di maksud dengan sistem bagi tiga adalah dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap/ penyadap untuk di sadap. Adapun pembagiannya di bagi tiga yang dua bagiannya untuk si penyadap dan satu bagiannya untuk yang punya kebun, misalnya dalam sepekan menghasilkan 120 kg getah karet, di bagi tiga menjadi 40 kg, yang mana 40 kg untuk empunya kebun dan sisanya untuk penyadap.

Seperti halnya sistem talobiah takurang, sistem bagi tiga ini pun di dasari atas rasa solidaritas sesama manusia dan saling tolong-menolong akan sesame saudara. Sistem ini juga terjadi biasanya karena pemilik kebun bertempat tinggal jauh dari lakosi kebun etrsebut.

B. Pengaruh Sitem Bagi Hasil Karet Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial Masyarakat Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantang Singingi

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil dan pola-pola bagi hasil karet di desa Koto Simandolak dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mencermati hal tersebut, penulis melihat bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil yang di pakai oleh masyarakat desa Koto Simandolak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam perekonomian mereka. Apalagi semua itu di dukung oleh kondisi geografis wilayah yang cukup baik dan sangat cocok untuk pertanian terutama karet.

Untuk lebih jelasnya bagaimana pengaruh sitem bagi hasil karet terhadap perekonomian masyarakat Koto Simandolak, penulis mencoba menganalisa sistem apa yang lebih dominan dipakai oleh masyarakat Koto Simandolak.

Dari ke lima macam praktek bagi hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat desa Koto Simandolak yang paling dominan adalah sistem *bagi duo* (paroan) atau 40 %,di susul dengan sistem bagian batang 20 %, selanjutnya sitem bagi tiga dan sistem *talobiah takurang* masing-masingnya 15 % dan yang terakhir adalah sistem sewa yaitu 10 % dari jumlah petani dan pemilik kebun yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan kebun karet mereka.

Adapun dalam sistem bagi duo(paroan) walaupun hasil sadapan karetnya dibagi dua dengan pemilik kebun, namun mereka tidak begitu merasa terbebani dengan tuntutan itu. Bagi petani yang memakai sitem bagi hasil ini, mereka

berfikir ingin berusaha meningkatkan kondisi ekonomi mereka ke tingkat yang jauh lebih baik dari sebelumnya, karena itu sudah merupakan tugas mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh³.

Dari penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara baik kepada pemilik kebun maupun petani penggarap sendiri tentang bagi hasil karet ini terhadap perekonomian mereka, mendapat tanggapan yang sangat bagus, mereka menyebutkan bahwa sistem bagi hasil karet yang mereka lakukan sangat membantu perekonomian mereka kejenjang yang lebih baik dari sebelumnya.

Bagi petani, sistem bagi hasil karet ini meningkatkan perekonomian mereka yang pada awalnya tidak mempunyai kebun untuk di sadap/ digarap hingga pada akhirnya ada kebun walaupun pada dasarnya itu bukan kebun milik mereka, dengan demikian mereka bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka, berikut beberapa pengaruh sistem bagi hasil karet terhadap perekonomian petani penggarap/penyadap⁴;

1. Bisa menyekolahkan anak-anak mereka hingga ada yang sampai ke jenjang perguruan tinggi.
2. Bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, khususnya kebutuhan primer dan sekunder.

³ Hasil Wawancara dengan Petani Penggarap, Koto Simandolak, 27 Februari 2008

⁴ Hasil Wawancara dengan Petani Penyadap, Koto Simandolak, Februari 2008

3. Memiliki lahan yang di amanatkan oleh yang punya kebun, sehingga mereka terjamin untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
4. Terkadang mereka pun bisa membeli alat-alat elektronik seperti Radio, TV dan bahkan bisa merenovasi rumah.
5. Secara psikologis mereka akan lebih percaya diri karena memiliki pekerjaan.
6. Dan di dalam bermasyarakat mereka bisa berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya.

Sedangkan keuntungan secara ekonomis yang di dapat oleh para pemilik kebun adalah⁵.

1. Lahan yang mereka miliki tidak terlantar begitu saja akan tetapi, tetap menghasilkan atau memproduksi walaupun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.
2. Mereka dapat melakukan usaha/pekerjaan lain untuk menunjang perekonomian mereka di luar bidang pertanian karet.

Sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak ini selain berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat juga berpengaruh terhadap aspek sosial, karena adanya kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang mengakibatkan terjadinya hubungan harmonis yang penuh kekeluargaan diantara keluarga mereka. Terutama dalam sistem talobiah takurang (lebih

⁵ Hasil Wawancara dengan Pemilik Kebun karet, Koto Simandolak, Februari 2008

kurang), karena petani penggarap sangat tertolong dengan adanya kebun yang di amanatkan kepadanya oleh pemilik kebun, sehingga mereka menganggap orang yang punya kebun sebagai keluarga mereka sendiri⁶.

Dari penelitian yang penulis lakukan, pada sistem talobiah takurang ini dalam kasus bapak Yahya dan bapak Umar, di antara mereka tercipta hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah seperti satu keluarga.

Dengan adanya perekonomian masyarakat yang baik tentunya akan tercipta rasa solidaritas yang tinggi, sehingga perbuatan-perbuatan amoral yang tidak di ingini seperti pencurian, perampokan dan lainnya dengan sendirinya akan dapat teratasi, di karenakan di dalam masyarakat tidak memberikan peluang akan terjadinya hal tersebut, begitu juga dengan pengangguran yang hidupnya sering menjadi benalu di masyarakat dengan sendirinya juga akan teratasi⁷.

C. Sistem Bagi Hasil Karet Di Desa Koto Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil karet yang di lakukan oleh masyaraka Koto Simandolak secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fiqhi, hal ini disebabkan oleh mesayarakat Koto Siamndolak yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat di pengaruhi oleh kehidupan beragama dan juga terlihat dari

⁶ Ajasmi (Kepala Desa), *Wawancara Pribadi*, Koto Simandolak Februari 2008

⁷ Hasan Basri (Tokoh Masyarakat), *Wawancara Pribadi*, Koto Simandolak Februari 2008

mereka para orang tua d ideas Koto Simandolak ini menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang bernaungkan agama.

Akan tetapi secara teori, mereka belum mengetahui dan bahkan tidak mengetahui sistem dan pola bagi hasil karet yang mereka terapkan sehari-hari sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan bentuk-bentuk sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori serta pendapat para ahli ekonomi Islam tentang bagi hasil pertanian. Penulis juga telah menjelaskan macam-macam bagi hasil dalam pertanian yang sah dan yang tidak sah. Sementara tentang bagaimana sistem bagi hasil karet di desa Koto Simandolak pun sudah dijelaskan secara rinci.

Adapun bentuk bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam disebut muzara'ah dan musaqah, untuk itu pada pembahasan mengenai analisa ini penulis akan memfokuskan pada akan muzara'ahnya.

Dalam menganalisa sistem bagi hasil karet d ideas Koto Simandolak menurut ekonomi Islam penulis akan memilah dari bentuk sistem yang dilakukan oleh masyarakat Koto Simandolak.

Ada lima bentuk sistem bagi hasil karet yang diterapkan oleh masyarakat desa Koto Simandolak Yaitu: (1). Sistem Sewa, (2). Sistem bagi dua/ Paroan, (3). Sistem bagian batang, (4). Sistem talobiah takurang, (5). Sistem bagi tiga.

Dari lima sistem tersebut sebenarnya sistem sewa tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena tidak terdapat pola bagi hasil didalamnya, akan tetapi penulis mencoba sedikit menjelaskan apakah sistem ini sesuai atau boleh dilakukan dalam pertanian. Karena bagaimanapun juga sistem ini di pakai oleh masyarakat khususnya masyarakat di desa Koto Simandolak.

Muhammad Safi'I Antonio dalam bukunya "Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan" menjelaskan bahwa ijarah (sewa) adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan ke pemilikan atas barang tersebut⁸.

Dari penjelasan ini dapat di tarik kesimpulan bahwa akad sewa terjadi dalam pertanian karet di desa Koto Simandolak sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, karena hanya bersifat pemindahan hak atas pengelolaannya bukan pemindahan hak atas kepemilikannya.

Sedangkan keempat sistem lainnya yaitu sistem *bagi duo*, *bagian batang*, *talobiah takurang* dan sistem bagi tiga sudah terlihat relevansinya dengan muzara'ah karena di dalamnya terdapat bagi hasil. Akan tetapi perlu kajian yang lebih teliti dari keempat sistem tersebut apakah benar-benar sudah sesuai menurut ekonomi Islam, dari itu penulis mencoba menelaahnya satu persatu.

⁸ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta, Tazkia Institut, 1999) hal. 181

Sistem bagi dua yang terdapat di desa Koto Simandolak sudah sesuai dengan akad bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau muzara'ah. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan AlSyaihani, yang di kutip dari bukunya Nasrun Harun mengenai bentuk-bentuk muzara'ah yang di anggap sah yaitu jika pemilik lahan menyediakan lahan sedangkan petani menyediakan alat pertanian dan tenaga kerja sehingga yang menjadi objek muzara'ahnya adalah pemanfaatan lahan⁹.

Begitu juga halnya dengan sistem bagi dua yang di lakukan oleh masyarakat Koto Simandolak, yang mana pemilik kebun hanya menyediakan lahannya saja sedangkan mengenai alatpertanian dan obat-obatan di sediakan oleh petani, kemudian hasilnya nanti akan di bagi dua sesuai dengan ketentuan yang telah di atur oleh kedua belah pihak. Sistem bagi dua yang dilakukan oleh masyarakat Koto Simandolak juga sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu bibit yang di sediakan boleh dari pemilik lahan dan boleh dari petani penggarap. Begitu juga halnya di Koto Simandolak yang mana bibit di sediakan pemilik kebun sehingga petani penggarap hanya tinggal menggarapnya saja.

Adapun mengenai hal-hal yang mungkin terjadi selama penggarapan berlangsung seperti bencana banjir atau kebakaran yang mana tidak terdapat ganti rugi, hal tersebut tidaklah membatalkan akad muzara'ah yang sah. Sebab dalam sistem bagi dua (paroan) ini kedua belah pihak bersama-sama

⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000)hal.279

menanggulangi biaya, sehingga keduanya mendapat bagian dari hasil kebun begitu juga kerugiannya.

Sedangkan dalam sistem bagian batang yang di lakukan oleh masyarakat Koto Simandolak, yang mana di dalamnya terdapat bagian tertentu yang di dapat oleh pemilik lahan dari hasil kebun, untuk itu sesuai tidaknya site mini dalam pandangan ekonomi Islam perlu dilihat sebab pemotongan tersebut, sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya mengenai bagi hasil pertanian yang syah dan tidak syah menurut ekonomi Islam yaitu apabila bagian yang didapat dari pemotongan karena disebabkan biaya pembibitan, obat-obatan maka itu syah dalam akad muzara'ah, namun apabila pemotongan itu di lakukan diluar biaya pembibitan dan obat-obatan maka hal tersebut di pandang tidak syah.

Mencermati hal tersebut penulis melihat bahwa syah tidaknya sistem bagian batang ini menurut ekonomi Islam dilihat dari akad yang di lakukan, juga sebab pemotongan hasil karet tersebut, kalau pemotongan itu terjadi karena biaya pembibitan hanya berupa bagian yang wajib di dapat oleh pemilik lahan karena mereka berfikiran kalu tidak karena lahanya maka petani tidak akan menghasilkan apa-apa, maka bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam dan akad yang di lakukan pun tidak syah.

Namun kebanyakan para pemilik lahan/kebun yang ada di desa Koto Simandolak beralasan bagian yang mereka dapat dari bagian batang ini adalah potongan dari biaya pembibitan yang mereka lakukan dari penanaman sampai

siap di sadap, maka sistem bagian batang yang di lakukan oleh masyarakat Koto Simandolak sudah relevan dengan konsep ekonomi Islam.

Adapun sitem talobiah takurang yang mana tujuan dasarnya adalah rasa saling tolong menolong dan saling membantu, maka sangat jelas kesesuaiannya dengan konsep ekonomi Islam, karena dalam Islam sendiri sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia dan bahkan tidak boleh membiarkan tetangganya atau saudaranya kelaparan sedangkan kita berkecukupan, sebagaimana yang terlampir dalam al-qur'an;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS.Al-Ma'idah: 2)

Sebagaimana yang telah di ketahui bersama bahwa dalam Islam apabila seseorang memiliki kelebihan harta baik itu sedikit atau banyak, maka ia tidak boleh sewenang-wenang dan membiarkan saudaranya terlantar. Karena dalam kepemilikan dan penggunaan harta, tidak semata untuk kepentingan pribadi, namun juga harus bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

Mencermati sistem *talobiah takurang* yang di lakukan oleh masyarakat Koto Simandolak ini tergolong ke sistem musaqah yang mana pada musaqah pihak kedua di beri kepercayaan untuk menjaga kebun dan mendapatkan bagian dari hasil kebun tersebut, begitu juga pada sistem *talobiah takurang*, petani penggarap di beri kepercayaan oleh yang punya kebun untuk menja kebunnya dan dia mendapatkan hasil dari hasil kebun tersebut.

Sedangkan yang terakhir yaitu sistem bagi tiga yang dilakukan oleh masyarakat Koto Simandolak, yang mana pemilik kebun mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari hasil kebun, pada sistem ini juga terdapat unsur ta'awunnya seperti sistem *talobiah takurang*.

Dari ke lima sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Koto Simandolak tersebut semuanya telah sesuai dengan sistem bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam, kecuali pada sistem bagian batang yang mana harus di lihat dulu tujuan dari pemotongan hasil dan akad yang di lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada lima bentuk sistem bagi hasil karet yang diterapkan oleh masyarakat desa Koto Simandolak yaitu: (1). Sistem Sewa, (2). Sistem *bagi duo*, (3). Sistem *bagian batang*, (4). Sistem *talobiah takurang*, (5). Sistem bagi tiga
2. Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Koto Simandolak dalam hal kebun karet ini sangat menguntungkan bagi empunya kebun dan bagi petani penggarap dan ini terlihat dari kehidupan sosial mereka terutama petani penggarap yang mulanya tidak mempunyai kerja, dengan adanya kerja sama ini mereka mempunyai kerja dan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan bagi pemilik kebun, tidak adanya kebun/lahan mereka yang terlantar sia-sia.
3. Sistem bagi hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat desa Koto Simandolak tersebut semuanya telah sesuai dengan sistem bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam yang tergolong ke pada muzara'ah dan musaqah, kecuali pada sistem bagian batang yang mana harus dilihat dulu dari tujuan dan sebab pemotongan dari hasil serta akad dilakukan sebelum pembagian.

B. Saran-saran

1. Karena Sistem pertanian yang di lakukan oleh masyarakat Koto Simandolak sesuai dengan ekonomi Islam untuk itu perlu di pertahankan dari generasi ke generasi.
2. Karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui bahwa sebenarnya sistem pertanian yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ekonomi Islam untuk itu kepada para ekonom Islam perlu memperkenalkan secara mendalam lagi tentang bagi hasil pertanian dalam Ekonomi Islam dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
3. Menanamkan kepada jiwa para pemuda bahwa bertani tidak akan mengurangi harkat dan martabat manusia, bahkan ini akan menghindarkan atau mengurangi tingkat pengangguran.
4. Sebaiknya budi daya karet ini lebih di kembangkan dengan cara memakai teknologi, kalau perlu di cari investor untuk membuat pabrik karet ini.
5. Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih aktif lagi dalam membudi dayakan karet ini, sehingga karet benar-benar menjadi andalan pendapatan Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahaf Khalaf, *Ilmu usul Fiqh* (ter), Masdar Helmi dari judul asli "*Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung, Gema Insani Press, 1997)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan dari judul asli, *Economic Doctrines of Islam*, oleh Soeroyo, (Yogyakarta, Dana Bkahti Wakaf, 1995)
- Amir Syarifuddi, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media, 2003)
- AM.Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta, CV.Rajawali Press, 1987)
- Al San'ani, *Subul Al-Salam*, (Bandung, Dahlan, tt)
- Bambang R.Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru, Mumtaz Cendekiawan Press, 2004)
- M.Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta, Tazkia Institut, 1999)
- M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi*, terjemahan dari judul aslinya, *Islamic Economic, Theory and Practice*, (Yogyakarta, PT.Dana Bhakti Wakaf, 1997)
- Muhammad S.Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keungan* (Jakarta, Tazkia Institut, 1999)
- Muhammad Nashiruddin Al-abani, *Ringkasan Shaih Muslim*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2003)
- Muhandis Natadiwirja, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta, Granada Press, 2007)
- Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000)
- Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000)
- Sadono Sukimin, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada)
- Smuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta, Media Global Edukasi, 2004)
- Sodono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* , (Jakarta, Raja Wali Pers)
- Sulaiman Rasyid.H. *Fiq Islam* (Bandung : CV Sinar Baru 1998)
- Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997)
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup Peluag, Tantangan dan Prospek* (Jakarta, alvabet 2000)

DAFTAR LAMPIRAN

A. Daftar Wawancara

B. Surat Izin Riset

DAFTAR TABEL

Table I	Jumlah Penduduk Desa Koto Simandolak Menurut jenis Kelamin.....	12
Tabel II	Jumlah Penduduk Menurut Ketentuan Usia.....	12
Tabel III	Personalia Pemerintahan Desa Koto Simandolak.....	14
Tabel IV	Sarana dan Pra Sarana Pendidikan	17
Tabel V	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	19

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada pemilik kebun sekaligus sebagai penyadap:

1. Berapa luas kebun karet yang bapak miliki dan ada dimana?
2. Sebenarnya, apakah bapak suka menjadi petani khususnya petani karet?
3. Apakah bapak pernah menyadap karet di kebun orang lain?
4. Bagaimana hasil karetnya, memuaskan atau tidak?
5. Selain menyadap karet, adakah pekerjaan lain yang bapak tekuni?
6. Selama ini apakah kebutuhan keluarga bapak terpenuhi dengan hasil menyadap karet?
7. Apakah ada kebun karet bapak yang orang lain menyadapnya?

8. Bagaiman pembagian hasilnya?
9. Apakah bapak merasa dirugikan?
10. Apakah alasan bapak hingga bapak mempekerjakan orang lain untuk menyadap kebun karet bapak?

Pertanyaan yang di tanyakan kepada penyadap karet yang bukan pemilik kebun:

1. Apakah kebun yang bapak garap ini kebun bapak sendiri?
2. Bagaiman cara pembagian hasilnya?
3. ada Potongan-potongan tidak?
4. Siapa yang menyediakan pupuk atau obat-obatnya?
5. Apa yang bapak lakukan atau kerjakan setelah selesai menyadap karet ini?
6. Adakah kendala yang bapak hadapi dalam menyadap karet ini?
7. Pernahkah adanya masalah antara bapak dengan pemilik kebun?
8. Apa hubungan bapak dengan yang punya kebun?
9. Selama ini apakah kebutuha bapak dan keluarga terpenuhi dengan hasil karet, apalagi harus berbagi dengan yang punya kebun?
10. Selama ini apakah pernah bapak merasa di rugikan?